

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku Literature:**

- Ateng Syarifudin, Suprin Na'a. 2010. *Republik Desa*. Bandung: Alumni.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Cetakan Keempat. Bayumedia Publishing.
- Mashab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. . Yogyakarta: Cetakan I. PolGov. Fisipol UGM.
- Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1983. *Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ronny Hanintijo Soemitro. 1999. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saragi, Tumpal. 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta: Ire Press.
- Soeharjo, Salamoen. 1997. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1996. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Surianingrat, Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sutoro Eko. 2014. *Buku Pintar “Kedudukan dan Kewenangan Desa”*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pemerintahan Desa (FPPD).
- Viktor M. Situmorang, Jusuf Juhir. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Yusuf Murtiono dan Wulandari. 2014. *Buku Pintar, "Perencanaan dan Penganggaran Desa.* Yogyakarta: Forum Pengembangan Pemerintahan Desa (FPPD).

**Peraturan perundang-undangan:**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Jurnal Hukum dan Karya Ilmiah:**

Agung Honest. 2014. *Tesis: Rekonstruksi Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berbasis Prinsip Good Village Governance.* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.

Hasman Husin. 2015. *Makalah: Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala.* Universitas Tadulako. Sulawesi.

**Internet:**

Ilham Ari, Konsep Pertanggungjawaban Pemerintah, <http://www.ilhamarisaputra.com/?p=126>, diakses pada tanggal 15 Desember 2015.